

BAB V

KESIMPULAN

Proses berdirinya Partai Damai Sejahtera diawali dengan keresahan beberapa orang muda yang melihat fakta-fakta maraknya pembakaran, perusakan, dan penutupan tempat ibadah khususnya gereja pada akhir masa orde baru sampai perjalanan reformasi. Fakta-fakta tersebut membuat para kumpulan anak muda yang tergabung dalam Jakarta Youth Fellowship berfikir untuk mencari keadilan kepada pemerintah. Ide untuk mendirikan partai politik yang memperjuangkan hak dan keadilan bermasyarakatpun muncul dalam komunitas tersebut. Ruyandi Hutasoit yang saat itu cukup dikenal masyarakat dengan kasus pembakaran dan penganiyayaan Sekolah Teologi Kristen didaulat untuk menjadi pemimpin partai ini. Pada tanggal 1 Oktober 2001, Partai Damai Sejahtera didirikan dan tanggal 28 Oktober 2001 Partai Damai Sejahtera dideklarasikan kehadapan publik untuk dipersiapkan menjadi peserta pemilu 2004.

Masalah-masalah perusakan gereja, diskriminasi, persamaan hak, dan masalah sosial lainnya menjadi materi yang terus disebar PDS untuk meyakinkan masyarakat pemilih bahwa PDS memperjuangkan keadilan dan hak-hak masyarakat. Masalah dan isu tersebut dikemas dalam program yang bernama Program Yusuf 2004. Pentingnya pengertian tentang kehidupan berbangsa dan bernegara juga menjadi bagian penting dalam kampanye PDS, maka dari itu PDS mengadakan pendidikan politik bagi caleg dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya politik dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama tidak lepas dari sorotan PDS, pendekatan kepada tokoh-tokoh tersebut termasuk dalam bagian strategi PDS untuk mendapatkan suara dari masyarakat pemilih. Program beserta materi-materi yang ada juga disosialisasikan sampai kepada kalangan masyarakat kelas bawah sehingga semua elemen masyarakat dapat mengerti perjuangan Partai Damai Sejahtera Pada Pemilu 2004.

Hasil Pemilu 2004 menyebutkan PDS berhasil meraih 2,13 % suara dan menjadi partai baru yang membuat kejutan pada pelaksanaan Pemilu 2004. Dengan perolehan itu PDS berhasil menempatkan 13 kaderanya di DPR-RI, 52 kader di DPRD Provinsi, dan 329 kader di DPRD Kabupaten/Kota. Kiprah PDS berlanjut di gedung parlemen, dengan jumlah 13 anggota PDS berhasil membentuk fraksi sendiri yang bernama Fraksi Partai Damai Sejahtera. Fraksi PDS berkiprah di parlemen selama 5 tahun (2004-2009). Beberapa Rancangan Undang-Undang menjadi perjuangan fraksi untuk disahkan dan ditolak. Demi menjaga Pancasila sebagai dasar negara Fraksi PDS menolak segala bentuk RUU yang bersifat menguntungkan kelompok tertentu yang mengancam keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia. Penolakan Fraksi PDS terhadap RUU Surat Berharga Syariah Negara, Perbankan Syariah, dan RUU Pornografi serta perjuangan terhadap SKB 3 Menteri tahun 1969 menjadi bukti nyata eksistensi PDS di parlemen dan keberpihakannya kepada konstituen, walau pada akhirnya suara Fraksi PDS tidak dapat mengalahkan fraksi-fraksi lain yang tetap setuju dengan pengesahan RUU tersebut.

Kelemahan penelitian ini terletak pada sumber, penulis hanya menggunakan sumber dari internal partai. Kesulitan untuk mencari sumber pembanding dan terbatasnya waktu penelitian menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini. Besar harapan penulis untuk penelitian ini dapat dilanjutkan dengan sumber-sumber yang lebih lengkap dan memadai sehingga dapat tercipta penulisan yang berimbang. Penelitian ini fokus kepada kiprah partai pada pemilu 2004 dan eksistensinya di parlemen, artinya masih terdapat beberapa kajian masalah yang bisa diteliti antara lain: Krisis internal partai dan dualisme kepengurusan, perbandingan perolehan suara pemilu 2004 dan 2009, dan pro kontra perubahan ideologi partai dari nasionalis religius menjadi nasionalis.